BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kerap disebut sebagai penyelamat saat perekonomian nasional terguncang. UMKM mampu bertahan sebagai pondasi perekonomian yang salah satu fungsinya menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Namun walaupun demikian, para pengusaha UMKM masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha, dan secara garis besar kesulitan yang dihadapi berkisar masalah permodalan, persaingan pasar dan bahan baku yang sulit didapat. Permodalan nampaknya menjadi alasan yang klasik yang menghadang perkembangan UMKM. Kebanyakan pelaku bisnis memutar usahanya dengan mengandalkan usahanya dengan modal sendiri. Ada pula sebagian kecil yang berusaha menambah modal dengan melakukan pinjaman ke bank maupun non bank .

Maka dari itu, pemerintah gencar memberdayakan sektor UMKM dengan memberikan pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, perbankan, dan perusahaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM, Akhirnya pada tanggal 5

November 2007, Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR. Melalui KUR ini pihak peminjam tidak perlu memberikan agunan kepada bank karena kredit ini merupakan pinjaman tanpa agunan dan sudah dijamin oleh pemerintah. Tahap awal program, KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya.

Dalam pelaksanaannya, upaya pemerintah menggenjot penyaluran kredit ini masih terhalang. Salah satu faktor penghalang adalah bayang-bayang rasio kredit bermasalah atau sering disebut Net Performing Loan (NPL). Salah satu faktor untuk menilai kesehatan suatu bank adalah dengan melihat rasio NPL, dihitung dari total kredit yang masuk kategori tidak lancar, dibagi total kredit yang diberikan. Rasio maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu 5% sehingga bila suatu bank memiliki rasio diatas 5 % maka dapat dianggap bahwa terjadi kegagalan penerapan strategi pemberian kredit yang efisien dan efektif.

Selain itu semakin tinggi nilai NPL suatu bank, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan dividen yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat return saham akan mengalami penurunan.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian nilai NPL KUR BSM terus meningkat mencapai 9,4% di akhir tahun 2013. Data tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1 Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional (31 Desember 2013).

**Tabel I.1 Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional
(31 Desember 2013)**

No	Bank	Realisasi Penyaluran KUR				NPL (%)
		Plafon	Outstanding	Debitur	Rata-rata Kredit	
		(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	(Rp juta)	
1	BNI	13.953.788	4.194.709	198.484	70,3	4,0
2	BRI Ritel	17.093.831	6.907.949	99.804	171,3	2,1
3	BRI Mikro	69.908.640	19.796.371	9.181.917	7,6	1,4
4	Bank Mandiri	14.454.479	6.527.536	295.498	48,9	3,5

5	BTN	4.259.955	1.993.916	23.701	179,7	3,7
6	BUKOPIN	1.778.625	643.112	11.905	149,4	4,5
7	BSM	3.635.832	1.445.395	51.225	71,0	9,4
8	BNI Syariah	226.506	103.964	1.200	188,8	3,4
TOTAL		125.311.656	41.612.951	9.863.734	12,7	2,6

Sumber: www.komite-kur.com

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa Bank Syariah Mandiri menduduki nilai NPL tertinggi dibandingkan bank lain yang menyelenggarakan program KUR. Pinjaman KUR mempunyai NPL melebihi toleransi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga dapat dianggap bahwa pinjaman KUR belum dikelola secara efektif di PT Bank Syariah Mandiri yang ditunjukkan indikator tingkat NPL KUR mencapai 9,4%.

Upaya yang berkesinambungan dalam menangani peningkatan NPL pada pinjaman KUR harus terus dilakukan terutama dari segi pemberian kredit oleh manajemen BSM. Pemberian kredit merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Karena itu dalam upaya mengatasi tingginya NPL, upaya yang dilakukan adalah dengan menganalisis dan memprediksi suatu permohonan kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran kredit tersebut. Proses pemberian kredit pun menentukan keefektifan dan keefisienan pemberian kredit, jika kredit yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas dan efisiensi pemberian kredit akan tercapai dengan kata lain NPL yang dicapai akan rendah yaitu dibawah standar maksimal, yaitu 5%.

Kekurangsehatan dalam mengelola pinjaman KUR menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul: **“ANALISIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK CALON DEBITUR PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI“**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sebagai latar belakang permasalahan, maka permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pihak PT Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada calon debitur?
2. Bagaimana implementasi alat analisis 5 C, 7 P dan 6 A pada pemberian kredit di PT Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat kepada calon debitur di PT Bank Syariah Mandiri.
- b. Untuk mengetahui implementasi dari analisis 5 C, 7 P, dan 6 A pada pemberian kredit di PT Bank Syariah Mandiri.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini adalah :

- a. Bagi Penulis
 - 1). Berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami dan menganalisis pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Syariah Mandiri.
 - 2). Penulisan ini bermanfaat untuk memperluas wawasan di bidang perbankan dan menerapkan disiplin ilmu yang di dapat saat kuliah.
- b. Bagi PT Bank Syariah Mandiri
 - 1). Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pengembalian Kredit Usaha Rakyat sehingga bisa meningkatkan kualitas kredit dan bisa menekan NPL Kredit Usaha Rakyat sampai titik terendah.

2). Penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan yang berguna dalam mengambil langkah perbaikan usahanya.

c. Bagi Pihak Lain

- 1). Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Syariah Mandiri.
- 2). Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan serta bahan kepustakaan guna menambah pengetahuan mengenai dunia perbankan.